

BAB IV

PERAN MUHAMMADIYAH DALAM MISI KEMANUSIAAN INTERNASIONAL PADA PERISTIWA GEMPA NEPAL TAHUN 2015

Pada tanggal 25 April tahun 2015, Nepal dilanda sebuah bencana alam. Gempa bumi berkekuatan 7,8 Skala Richter. Gempa bumi ini mengguncang salah satu negara di wilayah Asia selatan (Lama, 2013, pp. 1-3). Sumber gempa yang dangkal dari dasar bumi menyebabkan guncangan yang terjadi dipermukaan dirasa sangat kencang. Gempa yang mengguncang kawasan antara ibukota Kathmandu dan Kota Pokhara ini juga dirasakan di wilayah sekitarnya. Setelah gempa besar tersebut, dari data yang dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2016) gempa susulan terus terjadi selama 4 hari berikutnya dengan kekuatan berkisar antara 4 hingga 6,6 Skala Richter, gempa bumi ini menelan korban jiwa sedikitnya 9 ribu orang dan 14 ribu lainnya luka-luka, tidak hanya itu namun sedikitnya lebih dari 600 ribu bangunan di Nepal luluh lantah akibat gempa tersebut.

Wilayah geografis Nepal yang dikelilingi gunung-gunung membuat beberapa jalan terputus akibat longsor, sehingga terdapat banyak wilayah terdampak bencana yang belum dapat terjangkau oleh bantuan kemanusiaan seperti wilayah lembah gorkha yang menjadi pusat gempa, daerah kantipur, dan desa satunggal. Kerusakan infrastruktur serta terus meningkatnya jumlah korban jiwa mulai mengundang keprihatinan banyak pihak di dunia, terutama

negara-negara di wilayah tersebut serta aktor-aktor kemanusiaan baik nasional maupun internasional. Situasi darurat tersebut ditambah dengan mulai banyaknya bantuan kemanusiaan yang datang membuat pemerintah Nepal menyatakan bahwa kesiapannya dalam menghadapi situasi tersebut belum begitu baik sehingga masih terdapat banyak bantuan kemanusiaan yang belum termobilisasi oleh pemerintahan Nepal (BBC INDONESIA, 2015).

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) yang merupakan salah satu NGO nasional berbasis kelompok keagamaan yang berada di Indonesia, ikut berperan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Nepal tahun 2015. Mengingat *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* merupakan lembaga dibawah negara Republik Indonesia, sehingga dalam melaksanakan misinya ke luar batas negara MDMC tentu membawa nama Republik Indonesia. Indonesia melalui MDMC menghadapi banyak kendala dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Nepal sebelum akhirnya sebesar kurang lebih 37 ton bantuan kemanusiaan dari negara Indonesia tersalurkan pada masyarakat terdampak bencana di Nepal (Rahmawati Husein S. M., 2016). *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* merupakan salah satu perwakilan Indonesia yang memiliki peran dalam penyaluran bantuan kemanusiaan yang berasal dari Indonesia kepada pemerintah Nepal khususnya pada korban jiwa akibat gempa yang melanda wilayah Nepal tahun 2015.

A. Mengkoordinasikan Penyaluran Bantuan Kemanusiaan kepada Pihak Pemerintah Nepal dan Aktor-aktor Kemanusiaan Internasional.

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut berkontribusi dalam pengiriman misi bantuan kemanusiaan pada peristiwa gempa Nepal tahun 2015. Tujuan utama dari misi bantuan kemanusiaan Indonesia pada peristiwa tersebut yakni didirikannya Rumah Sakit Lapangan di salah satu wilayah terdampak di Nepal (BNPB, 2015, pp. 30-39).

Dalam pengirimannya, mengingat bahwa prosedur kebencanaan di negara Nepal yakni berawal dari peran Militer secara cepat tanggap yang sebelum akhirnya peran dari tim medis yang terdiri dari masyarakat sipil dikerahkan (Rahmawati Husein S. M., 2016). Prosedur bantuan kemanusiaan yang berada di Nepal sudah menerapkan sistem *On-site Operation Coordination Centre (OSOCC)* dan sistem *Reception/Departure Centre (RDC)*. Sistem OSOCC dan RDC ini merupakan sistem dunia yang dimiliki oleh *United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)* dimana sistem ini adalah sistem yang mengatur koordinasi antara seluruh aktor-aktor kemanusiaan yang datang pada saat situasi darurat di suatu negara seperti salah satunya Gempa Bumi (UNOCHA). Sistem ini merupakan sistem dunia yang sudah diterapkan di wilayah Nepal, sehingga seluruh aktor kemanusiaan yang membawa bantuan-bantuan kemanusiaan yang datang ke Nepal harus mematuhi mekanisme dari sistem tersebut.

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut mengirimkan bantuan kemanusiaannya untuk korban gempa bumi Nepal pada tahun 2015. Tim medis dari Indonesia terdiri dari Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC PB), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Palang Merah Indonesia (PMI), Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), dan termasuk didalamnya yakni *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* (Rahmawati Husein S. M., 2016).

Muhammadiyah melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* merupakan salah satu bagian dari tim yang didelegasikan pemerintah RI untuk melaksanakan misi bantuan kemanusiaan di Nepal. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki diskursus dalam bidang manajemen kebencanaan merupakan kali kedua menjalankan tugasnya diluar batas negara, sehingga pengalamannya bekerja dalam operasi lapangan secara langsung di luar batas negara menjadikan MDMC memiliki peran yang dinilai cukup signifikan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ini (Rahmawati Husein S. M., 2016). Dengan spirit Al-Ma'un yang merupakan pesan dari pendiri Muhammadiyah yakni K.H. Ahmad Dahlan, melalui peristiwa gempa Nepal ini merupakan salah satu bentuk manifestasi nyata dalam membantu sesama saudara yang sedang dalam keadaan sulit dan membutuhkan tanpa mengenal ras, golongan,

agama, bahkan batas negara wilayah baik didalam negeri maupun diluar batas negeri.

Mengingat bahwa Muhammadiyah adalah salah satu NGO nasional yang berbasis kelompok keagamaan, merupakan badan yang masih berada di dalam kewenangan negara sehingga perannya dalam melaksanakan aktivitas kemanusiaan pada peristiwa Gempa Nepal tahun 2015 tidak dapat terlepas dari peran negara yakni pemerintahan Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan interdependensi antara keduanya. Sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya diluar batas negara dalam hal ini Nepal harus tetap mengikuti prosedur dan mekanisme birokrasi negara Republik Indonesia (Rahmawati Husein S. M., 2016). Pada tanggal 26 April 2015, Presiden RI pada masa itu, Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan pengiriman bantuan kepada korban gempa bumi Nepal. Menindak lanjuti hal tersebut maka kemudian MDMC beserta aktor kemanusiaan lainnya seperti BNPB, kementerian, dan Lembaga kemanusiaan lainnya bersama dengan pemerintah RI menggelar rapat koordinasi pada tanggal 27 April 2015 (BNPB, 2015). Pada rapat tersebut membuahkan hasil bahwa pengiriman bantuan dilakukan atas nama pemerintahan Indonesia dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pengiriman bantuan akan dilakukan secara bertahap yakni melalui dua tahapan pemberangkatan.

Pada tahap pertama, terdapat dua tim yang akan di berangkatkan. Tim pertama pada tahapan pertama diberangkatkan pada tanggal 29 April 2015

yang dilakukan dengan menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI AU melalui bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta (Rahmawati Husein M. P., 2017). Adapun bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh tim pada tahap pertama berupa 1 unit tenda pengungsi, 3 tenda posko, dan 3 unit genset. Pada tahapan kedua, tim diberangkatkan pada tanggal 1 Mei 2015, Pada pengiriman bantuan tahap kedua ini Indonesia mengirimkan 100 unit tenda keluarga, alat kesehatan, 3 unit genset, tenda pengungsi, 1.000 paket lauk pauk, 14 koli kantong mayat, 612 koli MPASI, obat-obatan, selimut sebanyak 105 koli, 250 dus kornet kambing, dan masker. Untuk total bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia untuk korban bencana Nepal yakni kurang lebih 37 ton (Rahmawati Husein S. M., 2016). Pemerintah Indonesia juga menghitung kurang lebih seluruh bantuan yang dikirimkan senilai dengan 2 juta USD (BNPB, 2015).

Dalam melakukan operasi langsung di Nepal. Indonesia menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumberdaya manusia yang belum terbiasa melakukan operasi lapangan saat terjadi bencana alam di luar negeri dan keterbatasan relawan-relawan yang belum begitu mahir dalam hal berbahasa asing. Mengingat bahwa *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* merupakan anggota yang sudah memiliki pengalaman dalam operasi besar di luar batas negara, Akhirnya Indonesia menunjuk dua orang *Liasion Organizer (LO)* yang akan mengkoordinir seluruh tim dan bantuan

yang dikirimkan Indonesia ke Nepal. Adapun salah satu LO yang ditunjuk oleh Indonesia dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Nepal yakni Rahmawati Husein yang merupakan wakil dari *Humanitarian Forum Indonesia (HFI)* sekaligus wakil ketua dari *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* (Rahmawati Husein S. M., 2016). Adapun alasan Indonesia memilih MDMC dikarenakan MDMC adalah satu-satunya tim yang sudah memiliki *Emergency Medical Team (EMT)* yang sudah di akui oleh *World Health Organization (WHO)*, hal ini juga berdasarkan pada pengalaman MDMC dalam melaksanakan operasi lapangan besar pada saat setelah terjadinya bencana alam baik didalam negeri, maupun di luar negeri.

Sebelum pemberangkatan tim medis kedua pada tahapan pertama, Muhammadiyah melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* melakukan koordinasi dengan beberapa aktor kemanusiaan atau lembaga-lembaga Internasional seperti *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)* dan *Humanitarian Forum Indonesia (HFI)*. Adapun koordinasi yang dilakukan oleh MDMC yakni perihal kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan saat akan melaksanakan operasi besar lapangan di Nepal (Rahmawati Husein S. M., 2016). Tidak hanya itu, namun Indonesia melalui MDMC juga melakukan koordinasi dengan pihak militer Nepal yang pada saat itu menguasai mekanisme pendaratan di bandara Kathmandu, Nepal. Koordinasi ini terkait dengan perizinan pendaratan pesawat dari tim perwakilan Indonesia, mengingat kondisi bandara di Nepal yang tidak mampu

mendaratkan pesawat dalam jumlah yang banyak, hal ini juga mengingat bahwa tim perwakilan dari Indonesia menggunakan pesawat militer dan pesawat komersial pada saat itu.

Setibanya tim medis pemberangkatan pertama di Nepal pada tanggal 29 April 2015, tim perwakilan Indonesia mengalami beberapa kendala seperti belum terdaftarnya tim penolong ataupun bantuan kemanusiaan yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini disebabkan karena surat yang dikirimkan oleh pemerintahan Indonesia tidak dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran pada saat di Nepal. Pada awalnya, tim perwakilan dari Indonesia sudah mendapatkan tempat yang ditentukan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan Nepal, namun karena adanya penyampaian informasi oleh koordinator dalam tim pertama yang kurang lugas menyebabkan tim perwakilan dari Indonesia tidak mendapatkan tempat. Hingga tim perwakilan dari Indonesia harus menunda waktunya untuk dapat melakukan operasi lapangan sampai menunggu tim kedua dari Indonesia tiba di Nepal. Setibanya tim perwakilan medis kedua pada tanggal 2 Mei 2015 ini hari, tim dari Indonesia kembali menghadapi permasalahan yakni terkait dengan penurunan bantuan dan logistik dari Indonesia. Rahmawati Husein yang merupakan perwakilan dari *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* yang berada dalam perwakilan tim kedua selepasnya tiba di Bandara Kathmandu, melakukan koordinasi langsung bersama dengan pihak Militer Nepal yang pada saat itu menguasai bandara Kathmandu yang ada di Nepal terkait perizinan pendaratan

bantuan dan logistik dari pemerintahan Indonesia. Indonesia melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* melakukan pendaftaran kedatangan tim perwakilan dari Indonesia kepada pihak bandara dan juga mengisi persyaratan pada *Reception Departure Centre (RDC)* yang merupakan sistem dunia dari UNOCHA pada saat di bandara. Adapun persyaratan yang harus diisi oleh Indonesia yakni laporan akan kekuatan yang dimiliki oleh pasukan dari Indonesia serta laporan mengenai perlu atau tidaknya membutuhkan bantuan logistik dari pemerintah Nepal untuk para relawan yang datang (Rahmawati Husein S. M., 2016). Adanya mekanisme perizinan penurunan bantuan kemanusiaan yang cukup banyak mengambil waktu, membuat penurunan kurang lebih 37 ton bantuan kemanusiaan dari Indonesia menghabiskan waktu selama 7 jam (BNPB, 2015). Sebelum pada akhirnya seluruh tim dan bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh Indonesia berhasil keluar dari bandara pada pukul 7 pagi waktu setempat.

Setelah sampai di Nepal, tim delegasi dari Indonesia langsung menuju posko utama di *Ministry of Health (MOH)* Nepal. Tim perwakilan dari Indonesia kembali menghadapi beberapa hambatan, seperti surat yang sudah dilayangkan pemerintah Indonesia terkait penempatan operasi lapangan belum diterima oleh pihak Nepal. Akhirnya tim delegasi dari Republik Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan pendaftaran ulang seluruh tim yang datang. Karena adanya keterbatasan pengalaman dari BNPB dan TNI dalam melakukan operasi lapangan besar, maka melalui Rahmawati Husein yang

merupakan perwakilan dari *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* melakukan pendaftaran pada *Ministry of Health (MOH)* Nepal dan pada pihak *World Health Organization (WHO)* (Rahmawati Husein S. M., 2016). Pihak Kementerian Kesehatan Nepal meminta Indonesia untuk melengkapi prosedur kelengkapan izin praktek para dokter, melalui MDMC, Indonesia mengumpulkan dan melaporkan tentang seluruh surat-surat izin kerja para dokter dan beberapa formulir data pengalaman kerja tim medis dari Indonesia. Sedangkan dari pihak *World Health Organization (WHO)*, Indonesia melalui MDMC berkoordinasi terkait pendaftaran koordinasi pada *On-Site Operation Coordination Centre (OSOCC)* (Rahmawati Husein S. M., 2016). Hal ini dilakukan secara dengan cepat oleh perwakilan dari Indonesia melalui MDMC agar segera mempercepat operasi lapangan di Nepal, disamping perwakilan di Nepal membawa nama baik Garuda Perkasa Indonesia.

Setelah menunggu selama satu hari pada tanggal 2 Mei 2015, akhirnya tim kesehatan memperoleh izin kegiatan *Foreign Medical Team (FMT)*, setelah melengkapi seluruh surat pada *Ministry Of Health (MOH)* mulai dari jam 9 hingga 17 sore (Rahmawati Husein S. M., 2016). *Ministry of Health (MOH)* dan *World Health Organization (WHO)* mengeluarkan izin praktek operasi oleh perwakilan medis dari Indonesia berupa perizinan pelaksanaan operasi di daerah Kantipur yakni bertempat di Rumah Sakit Kantipur (BNPB, 2015). Hal ini membawa kabar baik sekaligus kabar buruk untuk seluruh tim

perwakilan Indonesia yang sempat menunda pekerjaannya, kabar baiknya yakni ketika perwakilan medis Indonesia sudah diberikan izin oleh pemerintah Nepal untuk melakukan praktek operasi di Rumah Sakit Kantipur. Namun sebaliknya, kabar buruknya yakni ketika tujuan utama bantuan kemanusiaan Indonesia ke Nepal adalah untuk dapat mendirikan Rumah Sakit Lapangan. Hal ini juga mengingat seluruh bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh Indonesia sebanyak kurang lebih 37 ton memadai untuk mendirikan Rumah Sakit Lapangan.

Namun, paling tidak tenaga medis sudah mendapatkan tempat dan mulai melaksanakan tugasnya dengan 9 pasien pertama di Nepal pada tanggal 3 Mei 2015. Kendati ada harapan ketika tim perwakilan dari Indonesia diputuskan melayani di Rumah Sakit Kantipur, namun dari kajian awal tempat tersebut bukanlah tujuan utama dan tempat yang strategis untuk bisa menjangkau lebih banyak warga dengan peralatan rumah sakit lapangan yang telah disiapkan perwakilan tim perwakilan medis dari Jakarta. Keputusan cepat dilakukan untuk tetap memakai rumah sakit Kantipur sebagai basecamp sementara para dokter spesialis melakukan tugasnya, sementara usaha keras tetap dilakukan untuk mencari tempat lain yang lebih sesuai terkait tujuan utama yakni pendirian Rumah Sakit Lapangan. Usaha lanjutan dilakukan sekeras mungkin untuk mencari tempat yang sesuai dan dekat dengan masyarakat terdampak (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2015).

Tabel 4.1 Koordinasi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dengan berbagai pihak terkait pada saat gempa bumi di Nepal tahun 2015

NO	AKTOR	AREA AKTIVITAS KOORDINASI
1.	KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program - Koordinasi laporan rutin
	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pembagian kerja lapangan
2.	MILITER Nepal	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan pendaratan pesawat - Mekanisme penurunan bantuan logistic - Pendataan pada Reception Departure Centre (RDC)
3.	MINISTRY OF HEALTH (MOH) Nepal	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran perwakilan tim - Perizinan penempatan operasi - Perizinan penempatan lokasi Rumah Sakit Lapangan - Pendataan pada On-Site Operation Cooperation Centre (OSOCC)
4.	World Health Organization (WHO)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran tim kesehatan - Penempatan Rumah Sakit Lapangan
5.	United Nation Operation Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran tim kesehatan - Pendataan RDC dan OSOCC - Penempatan Rumah Sakit Lapangan
6.	Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran tim perwakilan Indonesia - Pencarian lokasi pendirian Rumah Sakit Lapangan
7.	Otoritas Desa Satunggal	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan operasi lapangan pada Rumah Sakit Lapangan
8.	Otoritas Rumah Sakit Kantipur	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan pendirian Rumah Sakit Lapangan
9.	Humanitarian Forum Indonesia (HFI)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman kembali perwakilan tim Indonesia

Sumber : Berbagai Sumber

B. Memobilisasi Seluruh Bantuan Kemanusiaan Indonesia melalui Emergency Medical Team (EMT) yang dimiliki Muhammadiyah.

Tim koordinasi dan kaji cepat salah satunya yakni melalui perwakilannya, Rahmawati Husein, sekaligus salah satu perwakilan dari *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* dikerahkan untuk melakukan pendekatan ke beberapa pihak di Nepal. Kajian lapangan dan penilaian langsung ke lapangan yang terdekat diperlukan agar perizinan di tingkat otoritas setempat dapat segera dikeluarkan. Kerja komando lapangan menentukan tempat dan memastikan izin diusahakan agar tim Indonesia tidak lama lagi dalam situasi menunggu, hal ini merupakan tanggung jawab dari salah satu perwakilan dari MDMC yang sekaligus ditunjuk sebagai *Liaison Officer (LO)* dalam misi kemanusiaan di Nepal pada masa itu.

Pada tanggal 3 Mei 2015, Rahmawati Husein, yang merupakan salah satu perwakilan dari MDMC dengan cepat tanggap langsung mendaftarkan kembali perwakilan tim medis dari Indonesia kepada pemerintahan Nepal yakni *Ministry of Health (MOH)* dan kepada pihak *World Health Organization (WHO)*. Hal ini terkait dengan pendaftaran perizinan pendirian Rumah Sakit Lapangan yang akan didirikan oleh perwakilan dari Indonesia. Disamping melakukan pendaftaran kepada kedua pihak tersebut, Indonesia melalui MDMC juga melakukan koordinasi dengan beberapa NGO Internasional. Adapun MDMC melakukan koordinasi dengan *Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN)* yang merupakan jaringan NGO

Internasional yang memiliki kerjasama dengan pihak-pihak pada NGO lokal di Nepal yang kemudian membantu mengkontak semua jaringan yang dimilikinya (Rahmawati Husein S. M., 2016). Setelah melakukan koordinasi dengan jaringan NGO Internasional, akhirnya pihak ADRRN merekomendasikan 3 lokasi untuk perwakilan dari Indonesia. Beberapa tempat dijajagi, namun belum menemukan lokasi yang tepat untuk penempatan Rumah sakit Lapangan. Melalui MDMC juga, koordinasi dilakukan dengan jaringan lembaga-lembaga internasional yang sudah terbentuk sebelumnya, terkait tempat mana saja yang sudah dapat terjangkau oleh lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain.

Setelah mendapatkan rekomendasi lokasi terdampak, pada hari itu juga, Indonesia melalui salah satu LO nya yakni Rahmawati Husein kembali melakukan koordinasi dengan otoritas setempat atau LO lokal yang ditunjuk untuk memberikan arahan tim perwakilan dari Indonesia di Nepal. Keterlibatan pihak-pihak daerah setempat ini dilakukan guna mempermudah jalannya komunikasi dan informasi yang didapatkan secara lebih cepat dan jelas (Rahmawati Husein M. P., 2017). Setelah melakukan koordinasi dengan otoritas desa setempat, akhirnya MDMC melakukan peninjauan dan penilaian langsung ke beberapa desa yang telah direkomendasikan oleh ADRRN. Setelah melakukan penilaian langsung dan pendataan secara cepat dengan melibatkan otoritas setempat akhirnya diambil sebuah keputusan. Pengambilan keputusan desa Satunggal dilakukan setelah data didapatkan,

harapan mulai terlihat ketika pada area wilayah terdampak antusiasme penerimaan warga Satunggal dan dipastikan dengan komitmen otoritas desa dan surat formal meminta tim medis perwakilan dari Indonesia untuk melakukan tugasnya di desa tersebut (Rahmawati Husein M. P., 2017). Pada saat yang hampir bersamaan berita baik diterima bahwa pihak otoritas telah mengkonfirmasi desa Satunggal sebagai tempat pelaksanaan rumah sakit lapangan. Sore itu, Indonesia melalui MDMC didampingi 5 penduduk lokal melakukan *pre assessment*, menemui penduduk, perangkat desa dan melihat lokasi yang mungkin dijadikan tempat untuk area Rumah Sakit Lapangan (BNPB, 2015). Akhirnya dari *pre-assessment* lokasi ditentukan karena memenuhi kriteria Rumah Sakit lapangan yang ditentukan dan pendudukannya meminta dan mendukung tim perwakilan dari Indonesia. Setelah melihat ketetapan lokasi di Satunggal, dan dilakukan *assessment kedua*, pada tanggal 4 Mei. Akhirnya surat perubahan perizinan yang ditulis dengan bahasa Nepal didapat dan mulai tanggal 4 Mei tim Indonesia dapat mendirikan Rumah Sakit Lapangan (Rahmawati Husein S. M., 2016). Sementara surat perizinan dalam bahasa Inggris masih ditunggu oleh pihak perwakilan dari Indonesia.

Pada tanggal 5 Mei 2015, Akhirnya pendirian Rumah Sakit Lapangan mulai dilaksanakan. Pendirian 3 tenda (gawat darurat, operasi, dan tenda post recovery) yang satu tendanya berukuran 6x6 meter serta tenda posko untuk petugas kesehatan dan logistik obat dan alat kesehatan jika diperlukan

(BNPB, 2015). Jumlah tim Indonesia yang besar membuat mobilisasi personil tidak mudah dan membutuhkan transportasi yang tidak sedikit. Kebutuhan transportasi ini dapat dipenuhi dengan bantuan koordinasi dengan Brother Farooq untuk mencari sarana angkutan selama misi Indonesia berlangsung. Proses pendirian Rumah Sakit Lapangan tidak hanya melibatkan seluruh relawan yang datang dari Indonesia, namun juga seluruh elemen masyarakat desa tersebut juga ikut dilibatkan dalam proses pendirian Rumah Sakit, hal ini dilakukan mengingat bahwa yang menjadi salah satu fokus terpenting dalam penanggulangan pasca bencana yakni adanya keterlibatan langsung oleh masyarakat setempat agar ketika relawan sudah menyelesaikan tugasnya dan jangka waktunya sudah habis maka kegiatan penanggulangan bencana masih dapat berlangsung secara keberlanjutan (BNPB, 2015). Adapun surat perjanjian pendirian Rumah Sakit Lapangan oleh perwakilan medis dari Indonesia yakni hingga pada tanggal 25 Mei 2015 (Rahmawati Husein M. P., 2017).

Pilihan menentukan daerah yang dituju dan ingin dibantu tidak saja menjadi perkara sulit dalam hal peizinan, namun yang membuat harus berhati-hati dan membutuhkan keterampilan khusus yakni tidak salah dalam melakukan "*rapid speed assessment*" atau biasa disebut dengan kaji cepat kebutuhan yang tepat agar tidak salah langkah (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2015). Secara faktual lapangan desa Satunggal layak untuk ditolong karena hingga hari ke enam pasca gempa Nepal belum

terdapat bantuan kemanusiaan terstruktur yang menghampiri. Hal ini disebabkan karena daerah desa Satunggal yang hanya berjarak 1jam dari Kathmandu membuat pemerintah lengah dalam melakukan penanggulangan korban bencana ataupun penyaluran bantuan bencana. Penduduk dan para pemimpin desa juga sudah berusaha menghubungi banyak pihak, namun karena kesibukkan yang luar biasa pada pemerintah Nepal ditambah dengan situasi yang sedang *chaos*, maka seakan terabaikan dan tanpa harapan (BNPB, 2015).

“Desa Satunggal yang dikelilingi bukit pegunungan Himalaya luluh lantak akibat gempa bumi yang mengguncang Nepal. Sekitar 70% dari desa Satunggal hancur dimana terdapat 228 rumah rusak berat, 157 rusak sedang dan 148 rusak ringan. Setiap rumah bukanlah tempat yang ditempati satu keluarga, namun secara acak rata dihuni 6 hingga 7 keluarga, sehingga desa yang dihuni 35-40 ribu jiwa ini mengalami “pengungsi bencana” yang massif” (BNPB, 2015).

Dalam segala kerentanan karena minimnya data kependudukan dan karena banyaknya penduduk pendatang yang menyewa rumah tanpa identitas yang jelas, desa ini mencatat korban meninggal sebanyak 20 orang dan 200 orang lain terluka berat, serta ratusan lainnya cedera ringan, 3 bangunan sekolah negeri menambah lumpuhnya kegiatan anak-anak di kota ini dan ratusan lainnya terkena depresi ringan karena hancurnya rumah dan hilangnya harta benda yang dimiliki (BNPB, 2015).

Dengan tingkat kehancuran desa yang terbilang cukup parah membuat tim medis dari Indonesia tidak kemudian menjanjikan upaya kemanusiaan yang berujung pada harapan agar desa ini akan bisa melakukan pemulihan kembali dengan sempurna. Terkait dengan upaya penanggulangan, kebanyakan penduduk desa Satunggal adalah kelompok sosial ekonomi bawah, maka upaya kemanusiaan tidak semestinya menjadikan mereka hanya sebagai obyek proyek kemanusiaan namun juga dapat terlibat dalam proses pemulihan. Kemudian upaya kemanusiaan yang di sepakati ialah melakukan kolaborasi bersama masyarakat terdampak bencana di desa Satunggal. Proses selanjutnya adalah menemukan kapasitas masyarakat yang ada dan diperkuat dengan upaya-upaya kemanusiaan yang memartabatkan manusia.

Masyarakat diharuskan untuk memiliki pelayanan kesehatan dalam bentuk rumah sakit lapangan ini. kelompok pemuda, ibu-ibu, dan semua bagian masyarakat diharapkan terlibat mulai dari penurunan barang yang berat hingga pada berbagai persiapan yang memerlukan bantuan tenaga yang banyak. Hal ini dilakukan tidak lain karena jika bantuan kemanusiaan dari tim medis Indonesia sudah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke Indonesia, masyarakat setempat diharapkan dapat terus melanjutkan kegiatan tersebut. Sehingga program yang dibawa Indonesia tidak bersifat pasif atau berhenti.

“Indonesia melalui MDMC ikut menyalurkan obat-obatan tidak hanya obat-obat ringan namun juga obat-obat berlabel merah seperti obat anastesi. MDMC juga ikut menyalurkan bantuan seperti selimut dan paket kids untuk anak-anak terdampak bencana. Dalam tim medis atau kesehatan, MDMC mengirimkan 12 dokter operasi spesialis anastesi, dokter ortopedi, serta perawat anastesi. 20 orang perawat dikerahkan MDMC, serta 33 orang penunjang lainnya. Dalam hal penyediaan pelayanan kesehatan ini, tim medis MDMC merupakan tim yang juga cukup berpengaruh karena mayoritas seluruh tim medis yang dikerahkan sudah memiliki pengalaman dalam operasi lapangan besar didalam negeri maupun di luar negeri” (Rahmawati Husein S. M., 2016).

Hal ini tentu berbeda dengan tim medis yang lain, sebab mayoritas tim medis yang dikirimkan organisasi hanyalah relawan-relawan yang dikerahkan secara acak. Indonesia melalui MDMC merupakan satu-satunya tim yang memiliki sertifikat *EMT (Emergency Medical Team)* yang sudah diakui oleh *World Health Organization (WHO)* karena sudah pernah juga terlibat dalam operasi lapangan besar di luar batas negara (Aji, 2016). Sehingga dalam melayani pasien, tim medis dari MDMC jauh lebih berpengalaman. Muhammadiyah melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* juga merupakan salah satu aktor keagamaan yang terlibat pada peristiwa gempa bumi tersebut yang juga sudah memiliki lembaga khusus yang bergerak dalam isu kebencanaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga kelembagaan resmi yang dimiliki Muhammadiyah mengenai

kebencanaan juga menentukan kualitas dari tim khusus yakni *Emergency Medical Team (EMT)* yang dimiliki Muhammadiyah

Mengingat jangka waktu perizinan proses penyaluran bantuan kemanusiaan dari Indonesia kepada pemerintah Nepal berlaku hingga tanggal 25 Mei 2015, namun sebelum jatuh tempo penyaluran bantuan, pemerintah Indonesia telah menarik kembali tim kesehatan yang dikirimkannya ke Nepal. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan Nepal. Akhirnya Rumah Sakit Lapangan yang didirikan oleh perwakilan dari Indonesia sempat tutup pada tanggal 18 Mei 2015, yang kemudian diikuti penarikan tim perwakilan Indonesia di Nepal.

Mengingat jangka waktu masih panjang yakni hingga pada tanggal 25 Mei 2015, sehingga kurang lebih satu minggu lagi, akhirnya *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* berkoordinasi dan bekerjasama dengan beberapa anggota yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI) sepakat untuk mengirimkan pasukannya kembali ke Nepal hingga jatuh waktu tempo pendirian Rumah Sakit Lapangan di Nepal yang diberikan pemerintah dan otoritas Internasional habis (Rahmawati Husein S. M., 2016). Mengingat harus tetap membawa nama perwakilan dari Indonesia, melalui perwakilannya yakni MDMC tetap melakukan laporan setiap harinya baik tertulis maupun koordinasi langsung dengan baik, baik dengan pemerintahan Indonesia yakni melalui kementerian luar negeri Indonesia atau Duta Besar Indonesia, serta rutin melakukan laporan kepada pemerintahan

Nepal (Rahmawati Husein S. M., 2016). Akhirnya tujuan utama misi bantuan kemanusiaan Indonesia yakni berupa pendirian Rumah Sakit Lapangan pada peristiwa gempa bumi Nepal tahun 2015 dapat terealisasikan dengan baik hingga habis masa perizinan tersebut.